



---

## **Pelanggaran HAM di Kashmir sebagai Dampak dari Sengketa Wilayah India-Pakistan**

**Ines Florence Tabita Hutauruk, Mohamad Rosyidin, Satwika Paramasatya**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Kashmir is one of the areas currently in dispute between India and Pakistan which is often accompanied by rebellions in which the people of Kashmir are victims. This conflict has caused human rights violations because many Kashmiris have been subjected to violence and restrictions on rights, especially women in Kashmir who are often victims of rape. The purpose of this study is to find out why the Kashmir conflict has resulted in a lot of sexual violence against women in Kashmir. This study was analyzed qualitatively using the literature method obtained from books, scientific articles, journals and mass media relevant to this topic. Furthermore, this research will be processed using a congruent method that focuses on cause and effect and is presented in an explanatory manner. Several previous studies have focused more on the territorial dispute between India and Pakistan and the interests of the two countries and less on the impact of these disputes on the Kashmiri community, especially women. So the novelty of this research is to complement another perspective in viewing the territorial dispute between India and Pakistan which previously did not highlight its impact on the enforcement of human rights in Kashmir, especially women because previous research focused more on the causes of the conflict. This research will be prepared using the concept of war crimes and the theory of using rape as a war strategy. The efforts of India and Pakistan in fighting over the Kashmir region often lead to violence in the local community. The main argument of this study is that the prevalence of sexual violence in the Kashmir region is influenced by the use of rape as a war strategy.*

*Keywords: Territorial disputes, India, Pakistan, Rape, Kashmiri women*

### **PENDAHULUAN**

Kashmir merupakan salah satu wilayah yang masih menjadi sengketa hingga saat ini. Pakistan dan India merupakan pihak yang terlibat sengketa wilayah di Kashmir. Wilayah Kashmir berada di sebelah utara anak benua India dan memiliki luas 86.000 mil persegi. Sebanyak 35% dari total wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan dan 45 % berada di bawah kendali India (Sajid Ali, 2020). Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, negara tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu India yang didominasi oleh Sikh dan Hindu dan Pakistan yang didominasi oleh muslim (Prasetyo G, 2018). Pada tahun 1947, pemerintah Inggris mengharuskan para penguasa negara bagian tersebut untuk memilih bergabung dengan wilayah India atau Pakistan dengan mempertimbangkan geografis dan keinginan penduduk. Tindakan ini dilakukan untuk dapat mewujudkan transfer kekuasaan secara damai. Setelah penarikan Inggris dari India, Pakistan menolak untuk menyetujui proses dimana penguasa Kashmir menyetujui untuk bergabung dengan wilayah India. Yang mana hal ini bermula dari keinginan Maharaja Hari Singh akan kemerdekaan Kashmir namun pada bulan Oktober 1947 memutuskan untuk bergabung

dengan India. Keputusan ini merupakan bentuk imbalan atas bantuan India dalam membantu Kashmir melakukan perlawanan invasi suku oleh Pakistan (BBC, 2019). Sejak saat itu, timbul perang diantara kedua belah pihak yaitu India dan Pakistan. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa akibat tindak kekerasan dalam peperangan di Kashmir. Konflik tersebut membuat Pakistan mengerahkan pasukan militernya di wilayah Kashmir. Kedua negara saling berkompetisi dan berjuang untuk dapat menggabungkan Kashmir dalam negara bagian mereka. Konflik ini terus berlanjut hingga sekarang dan berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan ataupun saran untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Kedua negara kerap berhadapan langsung di wilayah Kashmir. Perseteruan kedua belah pihak sering disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban.

Salah satu pelanggaran HAM di Kashmir ialah pelanggaran hak asasi pribadi (*personal rights*) karena adanya sistem pembatasan layanan komunikasi, kesehatan serta penahanan sewenang-wenang dan penggunaan kekerasan selama operasi penjagaan. Pada tahun 2014, data menunjukkan dari 352 kasus pemerkosaan, 265 diantaranya merupakan anak dibawah umur. Pada tahun 2015 terdapat 312 kasus, 2016 tercatat 263 kasus serta 314 kasus pada 2017 (The Wire, 2020). Data ini merupakan data kekerasan pada masyarakat Kashmir yang dilakukan oleh pasukan keamanan India selama menduduki wilayah Kashmir. Menurut sebuah laporan dari outlet berita lokal, selama 3 dekade sebanyak 11.000 wanita di Jammu dan Kashmir telah menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dari pasukan militer India yang ditugaskan di wilayah tersebut. Disamping itu, laporan ini juga menyatakan bahwa 2.342 wanita telah menjadi martir. Berdasarkan laporan *Kashmir Media Service* (KMS) telah menjadi janda akibat dari agresi di wilayah tersebut (GeoNews, 2020). Sehingga dapat dilihat jika konflik yang terjadi di wilayah. Di Kashmir banyak perempuan yang diculik serta diperkosa oleh pasukan yang bertugas di sekitar wilayah sengketa. Kekerasan seksual telah menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir karena tidak terpenuhinya hak untuk tidak disiksa pada para wanita disana. Disamping itu dalam kasus Kashmir juga banyak wanita yang menjadi korban perbudakan seksual dan pencabulan.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana pelanggaran HAM di Kashmir yang disebabkan oleh sengketa wilayah. Beberapa penelitian tersebut meliputi jurnal karya Mubashir Ahmad Shah (2020) yang berjudul "*Human Rights in Kashmir With Special Reference to Women*", *International of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, ini membahas tentang bagaimana perempuan di Kashmir menjadi korban kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Sesuai dengan judulnya penelitian ini berfokus pada pelanggaran HAM terhadap perempuan di Kashmir dengan mendeskripsikan bagaimana tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kashmir.

Penelitian kedua yaitu karya Ouffee Maqbool (2017) yang berjudul "*Impact of Conflict on Woman in Kashmir*", *Academic Research Journals*, volume 5(3), halaman 114-122 pada bulan May 2017. Penelitian ini berfokus pada dampak dari konflik Kashmir terhadap perempuan di wilayah tersebut. pada situasi konflik perempuan kerap kali menjadi yang paling rentan terkena pukulan keras, bahkan karena sering melakukan pelecehan seksual, perempuan-perempuan menjadi menderita penyakit menular. Serupa dengan jurnal sebelumnya, jurnal ini juga membahas bagaimana pelecehan seksual yang dialami oleh wanita di Kashmir banyak dilakukan oleh pasukan keamanan. Akan tetapi tidak banyak data yang dapat terkumpul karena sedikitnya masyarakat yang melaporkan kasus tersebut. disamping itu, kekerasan yang dialami oleh wanita di Kashmir juga tidak mendapat penanganan yang baik karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah India

dan Pakistan.

Kedua penelitian diatas diatas sama-sama mendeskripsikan bagaimana pelanggaran HAM di Kashmir yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh wanita di wilayah tersebut. Penelitian ini akan menawarkan fokus yang berbeda dimana jika penelitian diatas hanya mendeskripsikan kekerasan seksual di Kashmir maka penelitian akan mencoba menganalisa mengapa konflik wilayah antara India dan Pakistan menimbulkan banyak kekerasan seksual terhadap perempuan di Kashmir.

## **PEMBAHASAN**

### ***Identifikasi Kejahatan Perang oleh India dalam sengketa Kashmir***

Bertolak dari pandangan realis yang mana dalam kondisi anarki tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara serta negara tidak perlu tunduk pada standar moralitas nasional. Sehingga tidak diragukan jika negara terkadang memulai perang untuk mendapatkan kekuasaan dari negara saingannya dan mendapatkan keamanan (Marsheimer, 2013). Kejahatan perang dalam perspektif realis menyatakan jika kejahatan perang bukan merupakan suatu kesalahan. Seperti penjelasan para kaum realis dimana pada saat perang maka aturan yang berlaku ialah memperbesar kemenangan dan meminimalisir peluang kekalahan. Ketika konflik bersenjata tidak kunjung usai dan kemenangan tak kunjung dapat diraih maka situasi ini memaksa pihak yang terlibat dalam perang melakukan pelanggaran dengan membunuh masyarakat sipil. Tindakan ini adalah "viktimsasi warga sipil" yang merupakan bagian dari strategi perang untuk mencapai kemenangan. Viktimasasi warga sipil merupakan suatu taktik yang disetujui oleh pemimpin atau pemerintah dari pihak yang terlibat perang. Meskipun tindakan ini tidak menjamin kemenangan dalam perang akan tetapi viktimsasi penduduk sipil dipilih menjadi suatu strategi oleh pemerintah yang berkeyakinan jika strategi ini dapat mengurangi biaya perang, menjaga kontrol atas sutau wilayah pendudukan serta mengurangi peluang kekalahan (Rosyidin, 2017).

Pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat secara dramatis di Kashmir sejak akhir tahun 1989 dimana dimulainya kampanye pemisahan diri. Ribuan masyarakat Kashmir ditahan secara sewenang-wenang dibawah undang-undang khusus yang memberikan kekuatan besar bagi pasukan keamanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan (Amnesty International, 1995). Mereka ditahan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa adanya tuduhan. Penyiksaan oleh pasukan keamanan menjadi rutinitas sehari-hari di Kashmir bahkan tindakan yang sangat brutal oleh pasukan keamanan telah menewaskan ratusan orang dalam tahanan. Disamping itu, banyak juga wanita di Kashmir yang mengklaim bahwa mereka telah menjadi korban pemerkosaan dari pasukan keamanan. Konflik berkepanjangan di Kashmir telah menimbulkan krisis hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan India di Kashmir menunjukkan adanya kejahatan perang oleh pasukan keamanan India yang ditugaskan di Kashmir. Kejahatan perang merupakan pelanggaran terhadap hukum perang. Menurut Statuta Roma pasal 8, perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan perang ialah pembunuhan yang disengaja, penyiksaan yang disengaja seperti eksperimen biologis, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius pada fisik, penghancuran dan perampasan properti, deportasi atau pengurangan yang tidak sah serta pengambilan sandera (United Nations, 2009). Berdasarkan definisi ini maka tindakan tidak manusiawi India di Kashmir dapat digolongkan sebagai kejahatan perang. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan pihak yang secara terang-terangan telah menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran hak asasi

manusia di Kashmir berasal dari pihak India.

Pemerintah pusat India memperkenalkan berbagai undang-undang kejam yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan memberikan kekebalan kepada pasukan keamanan yang ditempatkan di wilayah Jammu dan Kashmir (Mehmood Hussain, 2021). Celah hukum telah mempersulit penuntutan setiap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan India. Ketika otoritas lokal perlu menyelidiki tentara India yang dituduh melakukan pelanggaran HAM mereka harus meminta izin terlebih dahulu dari New Delhi dibawah *Armed Forces Special Powers Act* (AFSPA). Kritikus juga berpendapat jika AFSPA memberi angkatan bersenjata India kekuatan yang luas untuk membunuh, menembak serta melakukan penangkapan dan pencarian tanpa surat perintah (DW, 2022). Dibawah undang-undang ini, pasukan keamanan dilindungi dari tuntutan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini kemudian membuat pasukan keamanan yang beroperasi di Jammu dan Kashmir percaya bahwa mereka dapat bertindak dengan impunitas tersebut. OHCHR menemukan bahwa pasukan keamanan India kerap menggunakan kekuatan berlebihan untuk menanggapi protes kekerasan yang dimulai pada Juli 2016, termasuk terus menggunakan senapan pelet sebagai senjata untuk mengendalikan massa meskipun mereka telah menyebabkan cedera bahkan sejumlah kematian besar warga sipil (Human Rights Watch, 2019).

Tindakan India di Kashmir telah lama menarik perhatian masyarakat internasional. Pada tanggal 17-19 Desember 2021 pengadilan Russel tentang Kashmir dilangsungkan di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Pengadilan ini dipelopori civitas Kashmir yang merupakan sebuah LSM terdaftar di Kanada, bermitra dengan *World Kashmir Awareness Forum*, *Bertrand Russell Peace Foundation* (Nottingham, Inggris), *Permanent People's Tribunal of Bologna*, Italia, Nahla (Pusat Pendidikan dan Penelitian), Pusat Studi Lanjutan di Sarajevo, Universitas Internasional Sarajevo (IUS) dan Aljazeera Balkan (Daily Times, 2022) Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh India di Kashmir. Pengadilan Russel yang membahas tentang Kashmir diselenggarakan dengan organisasi hak asasi manusia dan akademisi terkemuka dari Kashmir, Italia dan Bosnia. Pengadilan ini juga turut melibatkan 15 hakim internasional. Beberapa saksi juga dihadirkan dalam pengadilan tersebut termasuk mengutip laporan *Amnesty International* and *Human Right Watch* yang membahas tentang wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan para penyintas di lapangan. Tindakan India telah banyak melanggar hukum internasional seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, pemerkosaan massal, penggunaan kekuatan yang berlebihan penghancuran warisan budaya, pembatasan kebebasan yang mana semuanya dilakukan dalam impunitas umum. Sehingga, banyak ahli percaya jika situasi ini telah mencapai ambang genosida ditengah ketidakberdayaan para korban (TRT World, 2021). Kesaksian dan bukti yang diberikan selama berlangsungnya pengadilan menunjukkan bagaimana India benar-benar melanggar hukum internasional serta prinsip-prinsip dasar moralitas. Namun, pemerintah Narendra Modi di India berupaya untuk menyapu bersih tragedi Kashmir dengan menggunakan berbagai taktik untuk mengalihkan situasi dan perhatian dari tragedi mengerikan di Kashmir. Salah satu taktik umum yang digunakan oleh India ialah dimana mereka menganggap jika kritik hak asasi manusia sebagai konspirasi pro-Pakistan serta menyembunyikan kekejaman dengan dalih kontraterorisme. Realisme menganggap jika keamanan merupakan prioritas utama. Hal serupa juga ada pada India dimana jika mereka ingin mengklaim Kashmir maka itu akan menjadi pertimbangan keamanan yang sangat bijaksana bagi mereka terhadap Pakistan dan China. Disamping itu, klaim tersebut juga

berfungsi sebagai perluasan geografis untuk sumber daya alam yang melimpah serta penghalang bagi filosofi Pakistan yang dapat mengancam keamanan India (Alam, dkk, 2016).

### ***Analisis penggunaan pemerkosaan sebagai strategi perang oleh pasukan keamanan India di Kashmir***

Teori pemerkosaan berpendapat jika pemerkosaan merupakan suatu taktik untuk mencapai tujuan. Biasanya pemerkosaan dilakukan oleh kelompok bersenjata atau militer (Wood, 2006). Komandan dapat mengadopsi pemerkosaan sebagai strategi perang untuk melawan populasi tertentu atau sebagai bentuk hukuman kolektif yang biasanya dilakukan dengan menjerat warga sipil. Selain itu pemerkosaan juga ditujukan untuk dapat mengontrol sumber daya atau wilayah maupun untuk membersihkan daerah dari populasi yang ditargetkan. Pemerkosaan memanfaatkan kontrol dan penyerahan yang dihasilkan dari menanamkan rasa takut, penghinaan dan ketidakberdayaan. Disamping itu, pemerkosaan juga ditujukan untuk mengurangi perlawanan sipil dan merusak akar budaya (Gottschall, 2004).

Dalam memahami perang, militer India meyakini apabila mekanisme diplomasi dan negosiasi gagal maka dalam keadaan seperti ini tujuan dan strategi politik ditempuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sehingga diperlukan perang dengan penggunaan strategi meskipun pada dasarnya perang harus selalu dihindari namun harus tetap bersiap untuk terlibat dalam perang demi melindungi kepentingan nasionalnya (Headquarters Army Training Command, 2004). Bertolak dari doktrin ini, maka dapat dilihat apabila pengiriman angkatan bersenjata di wilayah perbatasan Kashmir merupakan bentuk keterlibatan dari India untuk upaya melindungi kepentingan nasionalnya. Tanggapan negara India terhadap konflik bersenjata di Kashmir menunjukkan karakteristik perang kontra-pemberontakan klasik dimana strategi militer bersifat “*population-noncentric*” dan “*enemy-centric*”. Sehingga kehadiran angkatan bersenjata India dan polisi di Jammu dan Kashmir (sekitar 650.000-750.000) ditujukan untuk melakukan kontrol atas penduduk. Sehingga pelanggaran HAM di Kashmir termasuk penyiksaan tanpa pandang bulu merupakan taktik yang digunakan untuk menghancurkan kehendak orang lain.

Pemerkosaan digunakan sebagai sarana untuk membidik perempuan yang dituduh oleh aparat keamanan sebagai simpatisan militan. Sehingga dalam memperlakukan mereka, aparat keamanan berusaha untuk menghukum dan memperlakukan seluruh masyarakat. Dalam beberapa kasus, perempuan diperkosa karena tuduhan telah menyediakan makanan dan memberikan tempat bagi para militan. Dalam kasus lain, motivasi pelecehan juga terjadi karena para perempuan secara kebetulan berada ditempat serangan berlangsung sehingga kerap menjadi sasaran pembalasan. Sebagian besar kasus pemerkosaan ini terjadi saat operasi pengawasan dan pengeledahan yang mana memungkinkan resiko perempuan diperkosa di daerah tempat tinggal mereka. Pemerkosaan di Kashmir menjadi strategi aktif pasukan India untuk mengintimidasi dan menurunkan moral rakyat Kashmir. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sejumlah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan telah diperkosa didepan keluarga mereka sendiri. Sejak tahun 1988 pemerkosaan digunakan sebagai taktik perang untuk mengekang pemberontakan di Kashmir oleh angkatan darat India, *Central Reserve Police Force* (CRPF), dan personil keamanan perbatasan. Taktik sistematis pemerkosaan bertujuan untuk mengubah faktor demografis dari masyarakat. Menurut pakar hak asasi manusia, peristiwa Kunan Poshpora bagi wanita Kashmir merupakan penguat budaya impunitas

India untuk menekan perlawanan masyarakat Kashmir (Associated Press of Pakistan, 2021).

Laporan yang berasal dari Kashmir mengungkapkan bahwa perempuan yang berada dalam wilayah konflik menjadi sasaran karena terlibat dalam aktivisme politik serta dihukum karena merupakan simpatisan dari gerakan kebebasan atau karena memiliki keterkaitan dengan laki-laki yang ikut serta dalam memerangi pasukan India (Centre for Aerospace & Security Studies, 2019). Selanjutnya, laporan yang dirilis oleh *Kashmir Media Service* menunjukkan bahwa para wanita Kashmir diperkosa dan dipukuli selama operasi penjagaan dan pencarian seperti insiden yang terjadi di daerah Tral Pulwama dimana pasukan keamanan India memukulii semua anggota keluarga termasuk wanita di daerah Tral Pulwama. Menurut laporan ini pasukan India telah memperkosa 11.246 wanita sejak Januari 1989 dan menjadikan pemerkosaan sebagai alat untuk mengintimidasi dan membuat masyarakat Kashmir tunduk (Kashmir Media Service, 2021). Sebuah pengakuan dari seorang wanita penyintas pemerkosaan juga menyatakan bahwa dia telah ditangkap oleh tiga orang tentara dan 8-10 orang tentara telah memperkosanya secara bergiliran. Korban tersebut juga menyatakan jika para tentara membawa obor baterai besar untuk melihat tubuh telanjangnya (telesur, 2014).

Pada tahun 1958, rezim Nehru memperkenalkan *Armed Forces Special Powers Act* (AFSPA) yang menjadi cikal bakal undang-undang represif yang menjatuhkan sanksi pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan oleh tentara India di Jammu dan Kashmir (The Free Library, 2018). Pada daerah-daerah dimana AFSPA ditegakkan pemerkosaan, keamanan dan patriarki saling terkait. Negara bagian India mendefinisikan pemerkosaan untuk mengamankan kepentingan patriarkinya sehingga korban dapat dibunuh apabila diduga sebagai pendukung militan dan pelaku berseragam tidak dihukum karena kejahatan mereka. Bahkan, Nehru menyadari dampak dari AFSPA terhadap hak asasi manusia akan tetapi keamanan lebih diutamakan (Ranjan, 2015). Ketentuan dari AFSPA memberikan kekuatan kejam kepada angkatan bersenjata India auntuk memadamkan perbedaan pendapat sehingga perempuan memiliki resiko yang lebih besar mengalami kekerasan seksual. Bertolak dari pernyataan ini maka dapat dilihat jika perempuan di Kashmir menjadi sasaran karena diduga sebagai pendukung gerakan kebebasan dan bahkan karena memiliki keterkaitan dengan lelaki yang melawan pasukan India. Pasukan keamanan India yang ditugaskan di wilayah Kashmir terdiri dari dua pasukan paramiliter yaitu *Central Reserve Police Force* (CRPF) dan *Border Security Force* (BSF) yang mana telah melakukan penyerangan warga sipil selama operasi pencarian dan melakukan penyiksaan serta membunuh warga sipil dalam serangan pembalasan (The Kashmir Walla, 2018). Dalam situasi ini, pemerkosaan telah digunakan sebagai sarana untuk menargetkan perempuan yang dituduh oleh pasukan India sebagai simpatisan militan sehingga pasukan India berusaha menghukum dan mempermalukan seluruh komunitas. Penargetan perempuan oleh pasukan keamanan juga didorong oleh peran perempuan dalam komunitas yang merupakan pengemban kebudayaan sehingga akibat dari pemerkosaan secara efektif merusak jaringan budaya yang memungkinkan suatu komunitas berkembang (YRIS, 2015).

Tindakan kekerasan terhadap perempuan Kashmir dimungkinkan karena adanya budaya impunitas dan diperkuat oleh undang-undang seperti undang-undang *Armed Forces Special Powers Act* (AFSPA) yang melindungi pasukan keamanan India dari penuntutan kejahatan seksual yang telah mereka perbuat (DND, 2020). Undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah India mencegah personel keamanan dituntut. Sehingga, tidak ada satupun tentara, paramiliter atau polisi yang didakwa atau dihukum karena pelecehan seksual terhadap perempuan. *Armed Forces Special Powers Act*

(AFSPA) dibentuk oleh India untuk memberikan hak eksklusif kepada tentara di wilayah sensitif. Orang-orang kerap menyebut undang-undang tersebut sebagai ‘hukum kejam’ karena angkatan bersenjata yang bekerja dibawah undang-undang ini mendapatkan kekuatan khusus di wilayah mereka sehingga beberapa tentara menggunakan kekuatan khusus tersebut untuk melanggar hak-hak masyarakat. Disamping itu, beberapa tentara juga menggunakan hukum yang sama untuk melakukan pemerkosaan, penyiksaan seksual, penghinaan seksual dan pemerkosaan massal (Round Table India, 2016). Lembaga militer India juga melakukan perlawanan terhadap pencabutan *Armed Forces Special Powers Act* (AFSPA). Adanya impunitas ditunjukkan dari tindakan India yang secara konsisten dan terang-terangan mengagalkan tuntutan dan saran yang menyerukan untuk membawa pasukan keamanan India yang telah melakukan kekerasan seksual ke pengadilan (The Hindu, 2015). Dari tindakan ini dapat dilihat jika negara secara konsisten melindungi pelaku dari tuntutan hukum. Adanya struktur kekuasaan, kekerasan, penyangkalan dan impunitas menunjukkan adanya mandat politik.

Bukti dari penggunaan pemerkosaan sebagai strategi perang oleh pasukan keamanan India ditunjukkan oleh peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan di Kashmir yang terjadi di Kunan, Poshpora pada 23 Februari 1991 menunjukkan bagaimana pemerkosaan secara sistematis telah digunakan oleh pasukan keamanan India untuk menyorok seluruh penduduk yang berada di wilayah sengketa. Menurut *Committee of Concerned Scientists* yang merupakan kelompok pemantau hak manusia lokal menyatakan jika perempuan Kashmir menjadi sasaran pemerkosaan oleh pasukan India, baik selama penyerbuan militer, operasi pencarian ataupun serangan pembalasan. Bahkan dilaporkan oleh *Human Rights Watch* bahwa setelah pencabutan pasal 370 peningkatan tren pemerkosaan terjadi di desa-desa miskin dan terpencil di wilayah pendudukan (Tribune, 2020).

Sehar Kamran yang merupakan presiden senator *Centre for Pakistan and Gulf Studies* (CPGS) menyatakan jika India telah melakukan pembatasan terburuk dalam menekan suara penduduk di IIOJK dengan melakukan penculikan dan penyanderaan serta dimana lebih dari tiga dekade sebanyak lebih dari 11.000 perempuan di Kashmir menjadi korban pemerkosaan massal oleh pasukan pendudukan India di Jammu dan Kashmir (Urdu Point, 2020). Tindakan penculikan dan penganiayaan oleh pasukan India selama operasi pencarian dan pengawasan digunakan oleh pasukan India sebagai alat untuk menghukum komunitas. Serupa dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh *Human Right Watch* terkait pemerkosaan telah digunakan sebagai senjata perang di wilayah Jammu dan Kashmir, cendekiawan Seejma Kazi menyatakan jika pemerkosaan berfungsi sebagai alat untuk mensubordinasikan komunitas Kashmir pada umumnya. Selain itu, tindakan tersebut juga digunakan untuk melemahkan perlawanan Kashmir dan bahwa terdapat kasus dimana tentara yang didokumentasikan mengaku jika mereka diperintahkan untuk memperkosa wanita (TRT World, 2018).

Pada tanggal 29 Mei 2009 di daerah Sophian, dua wanita muda Aisyah dan Neelofar pergi ke kebun apel mereka di lembah Kashmir akan tetapi mereka tidak kembali ke rumah mereka dan keesokan harinya mereka ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi terluka parah dan pakaian compang-camping. Penduduk setempat menduga jika mereka telah diperkosa dan dibunuh oleh pasukan keamanan India yang bertugas di daerah tersebut. Tim medis yang melakukan otopsi membenarkan jika kedua korban telah diperkosa. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Ilmu Forensik di Srinagar juga mengkonfirmasi bahwa peristiwa tersebut adalah pemerkosaan dan pembunuhan namun pemerintah dan polisi setempat menolak temuan ini dan mempertahankan

pernyataan bahwa penyebab kematian korban adalah karena tenggelam. Meskipun kasus ini telah memicu protes diantara penduduk Sophian namun hingga bertahun-tahun keadilan untuk kasus ini belum ditegakkan. Bukan hanya satu kasus bahkan ratusan wanita yang diserang oleh pasukan India selalu ditutupi (Youth Ki Awaaz, 2018). Penutupan paksa dari kasus Aisyah dan Neelofar menunjukkan pengabaian terhadap proses keadilan dan adanya hambatan hukum untuk menegakkan keadilan atas pelecehan seksual oleh pasukan keamanan.

Dari bukti-bukti ini dapat dilihat apabila pasukan keamanan India telah menggunakan pemerkosaan sebagai strategi perang dalam kasus sengketa Kashmir. Meskipun, kasus-kasus ini jarang mendapat keadilan karena adanya impunitas yang diberikan oleh India kepada pasukan keamanan mereka. Pasukan keamanan India menargetkan aspek tertentu dari penggunaan pemerkosaan di Kashmir yaitu untuk melemahkan militan Kashmir. Pemerkosaan tentunya menimbulkan rasa malu baik bagi korban maupun para militan karena mereka gagal untuk melindungi kehormatan dan melayani bangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa pasukan keamanan India ingin menegaskan kekuatan dan dominasinya. Dengan melakukan pemerkosaan mereka menegaskan superior mereka atas musuh-musuh mereka dalam artian mereka melemahkan dan menundukkan musuh-musuh mereka.

## **KESIMPULAN**

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab III maka jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yaitu *Mengapa sengketa wilayah antara India dan Pakistan menimbulkan banyak kekerasan seksual di wilayah Kashmir* adalah karena perempuan di Kashmir dijadikan sebagai senjata perang oleh salah satu dari pihak yang bertikai yaitu India. Pasukan keamanan India yang dikirimkan ke wilayah perbatasan menggunakan pemerkosaan untuk mengintimidasi dan menundukkan masyarakat Kashmir. Dalam konflik ini, 278anita menjadi sasaran dikarenakan terlibat dalam gerakan pembebasan dan menjadi simpatisan untuk memerangi pasukan keamanan India. Selain itu, India dalam sengketa Kashmir juga telah menimbulkan indikasi kejahatan perang di Kashmir. Upaya-upaya India untuk mewujudkan kepentingan mereka di Kashmir banyak yang bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia khususnya hak-hak 278anita. Salah satunya ialah melakukan kekerasan seksual kepada 278anita dan beberapa tindakan lainnya seperti pembunuhan dan penahanan dengan sewenang-wenang. Serupa dengan prinsip realisme dalam memandang kejahatan perang dimana negara akan selalu memperjuangkan kepentingan nasional mereka meskipun harus melanggar standar moral internasional.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama dan kedua yaitu Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. dan Bapak Satwika Paramasatya, S.I.P., M.A yang telah membimbing selama penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran masukan sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

## **REFERENSI**

Sajid Ali, A. S. (2020). Kashmir Dispute and Challenges to the National Security of Pakistan : An Analysis. 3. Retrieved from



[https://www.researchgate.net/publication/341882234\\_Kashmir\\_Dispute\\_and\\_Challenges\\_to\\_the\\_National\\_Security\\_of\\_Pakistan\\_An\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/341882234_Kashmir_Dispute_and_Challenges_to_the_National_Security_of_Pakistan_An_Analysis).

Prasetyo G, M. (2018). The Assassination of Mahatma Gandhi in 1948. 38. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/download/7812/5515>

BBC. (2019, Agustus 8). Retrieved Desember 2, 2021, from Sengketa Kashmir : Pakistan 'turunkan' hubungan diplomatik dengan India: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49273909>

The Wire. (2020). *Collective Silence on Violence Against Women in Rings Loud in the Kashmir Valley*. Retrieved Februari 2, 2022, from <https://thewire.in/women/collective-silence-on-violence-against-women-rings-loud-in-the-kashmir-valley>.

Geo News. (2020, November 25). Retrieved November 5, 2021, from Indian forces have raped, molested more than 11,000 Kashmiri women in 3 decades : report: <https://www.geo.tv/latest/320584-indian-forces-raped-molested-more-than-11000-women-in-kashmir-kms>

Shah, M. (2020). Human Rights Violation in Kashmir With Special. 12. Retrieved from <https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001136.pdf>

Maqbool, O. (2017). Impact of conflict on woman in Kashmir. 116. Retrieved from <https://www.academicresearchjournals.org/IJPSD/PDF/2017/May/Maqbool.pdf>

Marsheimer, J. J. (2013). Structural Realism. In M. K. T. Dunne, *International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd Edition* (pp. 77-93). Oxford: Oxford University Press.

Rosyidin, M. (2017). *Kejahatan Perang: Perspektif Politik dan Hubungan Internasional*. Semarang: EF Press Digimedia.

Amnesty International. (1995, Januari 1). Retrieved Maret 10, 2022, from India : Summary of human rights concerns in Jammu and Kashmir: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/002/1995/en/>

United Nations. (2009). Retrieved Maret 1, 2022, from War Crimes: <https://www.un.org/en/genocideprevention/war-crimes.shtml>

Mehmood Hussain, S. M. (2021). Genocide in Kashmir and the United Nations Failure to Invoke Responsibility to Protect (R2P): Causes and Consequences. *Muslim World Journal of Human Rights*, 2. doi:<https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0017>

DW. (2022, Februari 4). Retrieved Februari 8, 2022, from Kashmir : Victims demand justice in indian army killings: [https://www.dw.com/en/kashmir-victims-demand-justice-in-indian-army-killings/a-](https://www.dw.com/en/kashmir-victims-demand-justice-in-indian-army-killings/a-60663029#:~:text=Indian%20human%20rights%20activist%20Vrinda,held%20accountable%2C%22%20she%20said)

[60663029#:~:text=Indian%20human%20rights%20activist%20Vrinda,held%20accountable%2C%22%20she%20said](https://www.dw.com/en/kashmir-victims-demand-justice-in-indian-army-killings/a-60663029#:~:text=Indian%20human%20rights%20activist%20Vrinda,held%20accountable%2C%22%20she%20said).

Human Rights Watch. (2019, Juli 10). Retrieved Maret 1, 2022, from Kashmir : UN Reports Serious Abuses: <https://www.hrw.org/news/2019/07/10/kashmir-un-reports-serious-abuses>

Daily Times. (2022, Januari 16). Retrieved Mei 25, 2022, from Russel Tribunal & Kashmir Issue: <https://dailytimes.com.pk/869391/russel-tribunal-kashmir-issue/>

TRT World. (2021, Desember 22). Retrieved Februari 26, 2022, from Voiceless no more : The Russell Tribunal on Kashmir: <https://www.trtworld.com/opinion/voiceless-no-more-the-russell-tribunal-on-kashmir-52898>

Alam, dkk. (2016). KASHMIR CONFLICT BETWEEN INDIA AND PAKISTAN: A REALIST PERSPECTIVE. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, 2, 8. Retrieved from [https://www.academia.edu/44740983/Kashmir\\_Conflict\\_between\\_India\\_and\\_Pakistan\\_A\\_Realist\\_Perspective](https://www.academia.edu/44740983/Kashmir_Conflict_between_India_and_Pakistan_A_Realist_Perspective)

Wood, E. (2006). Variation in Sexual Violence during War. *Politics and Society*, 34 No.3, 21. doi:10.1177/0032329206290426

Gottschall, J. (2004). Explaining Wartime Rape. *The Journal of sex research*, 41 No.2, 131. Retrieved September 02, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/3813647?origin=JSTOR-pdf>

*Headquarters Army Training Command.* (2004, Oktober). Retrieved Maret 15, 2022, from Indian Army Doctrine: <https://www.files.ethz.ch/isn/157030/India%202004.pdf>

*Associated Press of Pakistan.* (2021, Februari 23). Retrieved Maret 22, 2022, from India using rape, torture of Kashmiri women as 'instruments of state-terrorism': <https://www.app.com.pk/top-news/india-using-rape-torture-of-kashmiri-women-as-instruments-of-state-terrorism/>

*Centre for Aerospace & Security Studies.* (2019, September 18). Retrieved Maret 22, 2022, from Cries of Kashmiri Women: <https://casstt.com/post/cries-of-kashmiri-women/78>

*Kashmir Media Service.* (2021, September 30). Retrieved Maret 30, 2022, from India targeting women to 'suppress Kashmiris' freedom struggle: <https://www.kmsnews.org/kms/2021/09/30/india-targeting-women-to-suppress-kashmiris-freedom-struggle.html>

*telesur.* (2014). Retrieved Maret 30, 2022, from From Mass Rapes to Half-Widows : Kashmiri Women Under Occupation: <https://www.telesurenglish.net/amp/analysis/From-Mass-Rapes-to-Half-Widows-Kashmiri-Women-Under-Occupation-20181123-0032.html>

*The Free Library.* (2018, Maret 25). Retrieved Maret 30, 2022, from Rape : Indian Army's 'Military Strategy' in Kashmir.: <https://www.thefreelibrary.com/Rape%3A+Indian+Army%27s+%22Military+Strategy%22+in+Kashmir-a0531968473>

*The Kashmir Walla.* (2018, May 30). Retrieved Februari 24, 2022, from Violence Against Women as War Weapon: <https://thekashmirwalla.com/violence-against-women-as-war-weapon/>

Ranjan, A. (2015). A Gender Critique of AFSPA : Security. *Social Change*, 45 (3), 446. doi:<https://doi.org/10.1177%2F0049085715589471>

*YRIS.* (2015, Juni). Retrieved Maret 23, 2022, from Honorable Mention – Understanding Sexual Warfare in Kashmir: Prevalence, Consequences, and a Feminist Critique: <http://yris.yira.org/essays/1568>

*DND.* (2020, Agustus 2). Retrieved Februari 26, 2022, from Sexual Violence Against Kashmiri Women in Indian Occupied Kashmir: <https://dnd.com.pk/kashmir-bleeds-world-silence-over-sexual-violence-against-kashmiri-women-in-indian-occupied-kashmir/194446>

*Round Table India.* (2016, Juli 16). Retrieved Februari 26, 2022, from Truth behind Armed forces' horrifying acts of rape & sexual violence in Kashmir: <https://www.roundtableindia.co.in/truth-behind-armed-forces-horrifying-acts-of-rape-sexual-violence-in-kashmir/>

*The Hindu.* (2015, Februari 19). Retrieved Mei 25, 2022, from Politics of rape in Kashmir: <https://www.thehindu.com/opinion/lead/lead-article-politics-of-rape-in-kashmir/article6909603.ece>

*Tribune.* (2020, Agustus 5). Retrieved Maret 12, 2022, from India uses sexual violence as a weapon: <https://tribune.com.pk/story/2258065/india-uses-sexual-violence-as-a-weapon>

*Urdu Point.* (2020, Agustus 3). Retrieved Februari 8, 2022, from Indian Army Using 'Kashmiri Women's Humiliation' As Instrument Of War: <https://www.urdupoint.com/en/miscellaneous/indian-army-using-kashmiri-womens-humiliati-991473.html>

*TRT World.* (2018, April 4). Retrieved Februari 10, 2022, from The systematic use of rape as a weapon of war in Kashmir: <https://www.trtworld.com/opinion/the-systematic-use-of-rape-as-a-weapon-of-war-in-kashmir-16468>

*Youth Ki Awaaz.* (2018, Juni 1). Retrieved Maret 10, 2022, from For The Indian State, Rape is A Weapon of War in Kashmir: <https://www.youthkiawaaz.com/2018/06/for-indian-state-rape-is-a-war-weapon/>